
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana

Ni Made Vita Indriyani* dan I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

*made.vita@yahoo.co.id

How to cite (in APA style):

Indriyani, N, M, V., Putra, I, W, G, Y, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(2), pp.168-174. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174>

Abstract

LPD is one of the institutions formed by Pakraman Village which functions to run and manage the village financial system and strives to advance the welfare of the village community and fulfill the interests of the Pakraman traditional village community itself. In carrying out its main activities, namely channeling and collecting funds, LPD Susut Kaja and LPD Desa Pekraman Kebon Bangli also carry out their accountability based on the tri hita karana culture. In LPD, the term CSR is not used, but the concept of managing social funds has a similar concept to CSR. The results obtained in this study that the management of social funds of 5% of current profit in one year period is managed according to the tri hita karana culture. Where, from 5% of the current profit is used to harmonize relationships with God through yadnya in the form of punia funds, harmonize relationships with humans in the form of basic food assistance and education and harmonize relationships with the environment in the form of providing facilities and infrastructure to preserve the environment.

Keywords: *accountability; LPD; social fund; tri hita karana*

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat dengan (LPD) yaitu salah satu lembaga yang dibentuk oleh Desa Pakraman yang berfungsi menjalankan dan mengelola sistem keuangan desa serta berupaya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan masyarakat desa adat pakraman itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga melaksanakan akuntabilitasnya yang berlandaskan atas budaya tri hita karana. Dalam LPD, istilah CSR memang tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa pengelolaan dana sosial sebesar 5% dari laba berjalan pada satu tahun periode dikelola sesuai dengan budaya tri hita karana. Dimana, dari 5% laba berjalan tersebut digunakan untuk mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan melalui yadnya berupa dana punia, mengharmoniskan hubungan dengan manusia berupa bantuan sembako maupun pendidikan serta mengharmoniskan hubungan dengan lingkungan berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: akuntabilitas; LPD; dana social; tri hita karana

I. PENDAHULUAN

Pembentukan LPD didasari oleh adanya warisan budaya berupa Desa Pakraman yang merupakan suatu bentuk atau wadah sistem pemerintahan tingkat desa yang terdiri dari ikatan kekeluargaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sehingga LPD didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat desa pakraman/adat, dalam kegiatannya hanya melayani masyarakat desa pakraman saja, LPD tidak melayani masyarakat diluar dari wilayah desa pakraman/adat tempat LPD tersebut beroperasi. Karena itu LPD dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus (Putra Suryanata, 2019). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002 tentang LPD yang mewajibkan LPD untuk membagi labanya 20 % untuk pembangunan Desa dan 5 % untuk dana sosial. Akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah organisasi merupakan bagian dari penerapan prinsip *good governance*. Selain itu, akuntabilitas digunakan sebagai kontrol pelayanan pemerintah kepada public (Cindy, A, Salle, D A, 2018). Akuntabilitas

dapat tercapai dengan terlaksananya transparansi dan kejujuran (Sari dan Sudana, 2020). Dampak dari akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan rasa saling percaya para *stakeholders* dalam suatu organisasi. Akuntabilitas publik dinyatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang dijalankan pihak penerima amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) (Putra and Muliati, 2020). Permasalahan yang seringkali muncul terkait dengan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang diberikan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, serta kurang menekankan pada akuntabilitas bagi publik dan masyarakat luas, selain itu laporan pertanggungjawaban yang dibuat juga belum mengikuti standar serta rawan manipulasi (Hasniati, 2016). Salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas adalah budaya dan adat istiadat di suatu daerah (Kurniawan, 2016). Akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD sangat perlu diperhatikan karena adanya beberapa kasus kecurangan pengelolaan dana sosial LPD, salah satunya terjadi di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yaitu dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pekraman Selat yang menyalahgunakan dana sosial LPD yang seharusnya dibagikan sesuai dengan proposal (bali.tribunnews.com, 2019) serta Ketua LPD Tanggahan Peken yang melakukan korupsi akibat kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD (bali.tribunnews.com, 2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma, 2018). Sehingga sangat penting bagi pengurus LPD untuk menerapkan akuntabilitas dana sosial LPD karena akan berdampak juga kepada pemerintah desa sebagai penanggungjawab. Selain itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pekraman dimana lembaga ini melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa untuk melayani masyarakat desa setempat. LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan (Suryawan and Suaryana, 2018).

Dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga melaksanakan tanggung jawab sosialnya yang berkaitan dengan konsep "3P" (Elkington, 1998) yaitu keseimbangan antara *profit* (laba), *people* (masyarakat), dan *planet* (lingkungan alam). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, konsep "3P" masih menyebabkan ketidakseimbangan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, karena perusahaan masih saja terfokus pada keuntungan (*profit*) semata, sehingga perhatian yang diberikan kepada masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) terkesan tidak bersungguh-sungguh. Selain itu, perusahaan atau usaha bisnis di Indonesia kental kaitannya dengan budaya masyarakat di lingkungan perusahaan, serta spiritual (berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa). Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Pertiwi, 2013) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial menghasilkan empat sinergi implementasi, yaitu implementasi di perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Keempat sinergi ini merupakan cerminan budaya lokal di Bali yang dikenal dengan Budaya Tri Hita Karana (THK). (Windia, dan Dewi, 2007) menjelaskan bahwa konsep THK yang merupakan filosofi kehidupan masyarakat Bali pada dasarnya berhubungan dengan sistem kebudayaan, yaitu parahyangan berhubungan dengan subsistem nilai, pawongan berhubungan dengan subsistem sosial, dan palemahan berhubungan dengan subsistem artifak. Dengan demikian, budaya THK telah dapat dipergunakan sebagai suatu tata nilai atau kebiasaan yang menjadi pegangan anggota organisasi dalam melaksanakan kewajiban dan berperilaku di dalam organisasi. Setiap keputusan yang diambil dalam melaksanakan aktivitas senantiasa dipengaruhi oleh identitas budaya yang merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi bagi masyarakat di daerah Bali. Budaya THK digunakan sebagai landasan bagi individu maupun organisasi dalam setiap aktivitasnya, khususnya masyarakat desa Pekraman (desa adat) di Bali (Suardikha and Budiasih, 2017), sehingga rumusan masalah yang muncul adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD berlandaskan Budaya Tri Hita Karana?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau *stakeholdernya*. *Stakeholder* disini meliputi kreditor, *supplier*, pemegang

saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang dapat disebut sebagai *shareholders* melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai *stakeholders*. Sesuai dengan definisinya, *stakeholder* memegang peranan penting terhadap keberlangsungan perusahaan (Handoko, 2021). Hal ini dikarenakan *stakeholder* memiliki kemampuan dalam mengendalikan sumber daya yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitian ini, teori stakeholder digunakan karena adanya pemangku kepentingan (krama desa atau masyarakat) yang akan menerima manfaat dari dana sosial yang dikelola LPD.

Budaya Tri Hita Karana

Tri Hita Karana diartikan sebagai tiga penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (parahyangan), manusia dengan alam lingkungannya (palemahan), dan manusia dengan sesamanya (pawongan) (Suardhika, 2013).

III. METODE

Lokasi dalam penelitian ini adalah di LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli dikarenakan kedua LPD ini belum memiliki perencanaan yang jelas mengenai pengelolaan dana sosial, selain itu juga adanya beberapa kecurangan yang dilakukan di LPD Kecamatan Susut, sehingga peneliti mengambil dua lokasi ini sebagai lokasi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana sosial berlandaskan budaya tri hita karana. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode Penentuan Sampel menggunakan nonprobability sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan jenis purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut meliputi responden yang berkaitan secara langsung dalam pengelolaan dana sosial LPD seperti Kepala LPD, Bendahara LPD dan masyarakat sekitar yang dipilih karena responden ini sudah bisa mewakili informasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh (Sugiyono, 2015) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi awal ke lokasi penelitian terkait pemerataan pembagian dana sosial LPD, lalu ditetapkan responden penelitian dan dilakukan wawancara mendalam serta dilakukan proses dokumentasi berupa video.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD

LPD Susut Kaja Bangli dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli dalam mewujudkan tanggungjawab sosial terhadap stakeholder-nya berusaha dapat mengelola dana sosial yang merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan CSR LPD Susut Kaja Bangli dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder bahwa stakeholder adalah pemangku kepentingan yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholder-nya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi (Somania, 2019). Hal ini sesuai dengan yang di katakan narasumber terkait tanggung jawab LPD kepada stakeholder.

Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:

“.... Tanggung jawab atau akuntabilitas LPD Susut Kaja selalu dilaksanakan, salah satunya adalah kami selalu rutin melaporkan Laporan Keuangan kami kepada Bendesa dan LPLPD setiap bulannya. Selain itu juga, masyarakat mengetahui laporan keuangan yang kita susun melalui rapat tahunan. Jadi ada keterbukaan antara LPD maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disini juga selalu di audit secara internal karena biasanya jika ada audit secara eksternal itu dilakukan jika LPD tersebut bermasalah. Namun hingga saat ini, LPD Susut Kaja belum pernah ada masalah dalam pengelolaannya...”

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon Bangli:

“.... LPD selalu rutin melaporkan Laporan Keuangan ke LPLPD dan Bendesa Adat. Laporan keuangan disini juga selalu di audit secara internal yaitu oleh bendesa adat sebagai badan pengawas dan juga oleh LPLPD. Kami selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaporan maupun pengelolaan dana LPD...”

Akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD dicatat pada laporan keuangan setiap periodenya dan diklasifikasikan sesuai dengan akunnya.

Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:

“... Pencatatan dana sosial yang akan dibagikan dicatat terlebih dahulu pada akun kewajiban lain-lain. Ini dikarenakan LPD memiliki kewajiban atau utang kepada masyarakat untuk mendistribusikan dana sosial sebesar 5% dari laba per tahun. Jadi bukan perbulan yang disisihkan untuk dana sosial tapi per tahunnya...”

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:

“...Pencatatan dana sosial masuk ke akun tabungan ya. Setelah diakumulasikan laba setahun, lalu dibebankan ke akun tabungan. Nanti saat dana sosial tersebut digunakan, baru dikeluarkan dari tabungan berupa kas...”

Untuk pengelolaan dana sosial LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon terkadang masih memiliki sisa dari 5% tersebut, sisanya itu akan tetap dicatat pada rekening kewajiban atau utang pada LPD Susut Kaja, sedangkan LPD Desa Pkraman Kebon mencatat pada akun tabungan, dimana kedua akun tersebut masih dalm kelompok pasiva. Bedanya, pada LPD Susut Kaja dibebankan pada akun kewajiban lain-lain yang tidak mendapatkan bunga sedangkan, LPD Desa Pekraman Kebon membebarkannya pada akun tabungan dan akan mendapatkan bunga atas tabungan setiap bulannya sehingga ada pengembangan dari dana sosial tersebut.

Untuk dana sosial yang belum dikelola secara menyeluruh akan digunakan kembali untuk kepentingan Pura, Masyarakat maupun Lingkungan. Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja juga menyebutkan bahwa LPD Susut Kaja juga menerima proposal kegiatan dari dadia di Banjar Susut Kaja. Terkait dengan proposal yang diajukan itu akan didiskusikan dulu pada Paruman Desa dan jika disetujui, maka akan didanai menggunakan dana sosial tersebut. Kegiatan yang disetujui tersebut juga ada laporan pertanggungjawabannya nanti pada masyarakat dan Bendesa Adat. Sehingga konsep keterbukaan juga dilakukan pada LPD Susut Kaja.

Pada LPD Desa Pekraman Kebon juga terkadang dana sosial yang disediakan masih tersisa, namun biasanya dikelola kembali oleh pengurus untuk didistribusikan kepada masyarakat secara keseluruhan, baik yang melakukan transaksi atau tidak di LPD Desa Pekraman Kebon. Mengingat jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Pekraman Kebon juga tidak sebanyak yang ada di Desa Susut Kaja, sehingga pengelolaannya lebih mudah dibagikan langsung oleh pengurus LPD Desa Pekraman Kebon.

Pengelolaan Dana Sosial berlandaskan Budaya Tri Hita Karana

Pengelolaan dana sosial pada LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon sebenarnya berlandaskan pada Budaya Tri Hita Karana. LPD ini selalu membagi secara proposional dana sosial sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan dan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan.

Tujuan pengelolaan dana sosial masing-masing LPD pada penelitian ini sama yaitu pemerataan, namun terdapat beberapa konsep dan program yang membedakan pengelolaan dana sosial pada masing-masing LPD. Pada LPD Susut Kaja tidak ada program sendiri yang dibuat oleh LPD, namun peruntukannya telah dibagi berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.

Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:

“... Kami tidak memiliki program khusus yang kami rancang. Namun, untuk pembagian dana sosial LPD ini sesuai dengan Tri Hita Karana. Terkait hubungan dengan Tuhan, setiap ada upacara di Pura maupun di Desa, kami memang menyisihkan dana dari dana sosial untuk dipuniakan pada Pura. Biasanya berupa babi sebanyak 2-3 ekor. Selain itu juga dana sosial ini digunakan mendanai bazaar dan nantinya hasil dari bazaar ini dikelola untuk pembangunan Pura. Begitupun jika ada dari pengurus dadia yang mengajukan proposal untuk pelaksanaan upacara di dadia, kami juga mengambil dana tersebut dari dana sosial LPD...”

Konsep Tri Hita Karana sangat erat hubungannya dengan pengelolaan dana sosial LPD Susut Kaja. Selain untuk keperluan pura (Parahyangan). LPD Susut Kaja juga mengelola dana sosialnya untuk meningkatkan hubungan manusia dengan manusia (Pawongan).

Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:

“...Terkait dengan pawongan, kami rutin memberikan sembako maupun sumbangan kepada masyarakat seperti saat adanya pandemic covid-19, kami membagikan sembako secara merata pada seluruh masyarakat Banjar Susut Kaja. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa pada siswa yang berprestasi berupa buku dan alat tulis. Namun terkait dengan ngaben massal atau pitra yadnya, kami tidak memiliki program sendiri, hanya ada kontribusis seberapa saja dari LPD...”

LPD Susut Kaja juga mengelola dana sosialnya untuk keperluan lingkungan atau yang berkaitan dengan Palemahan.

Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:

“...Kebersihan dan kelestarian lingkungan juga selalu kami jaga, seperti penyediaan tempat sampah di lingkungan kami...”

Sedangkan, LPD Desa Pekraman Kebon memiliki program yang pasti dilaksanakan. Dimana, program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan masyarakat atau persetujuan paruman adat. Program tersebut antara lain Pitra Yadnya atau Ngaben setiap lima tahun sekali yang dibiayai seluruhnya oleh LPD, Program beasiswa, dana punia ke Pura dan kebersihan lingkungan.

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:

“...Kita melakukan dana punia ke Pura (Parahyangan) secara rutin yang biasanya disisihkan sebesar Rp 7.000.000,00 untuk keperluan Pura. Biasanya dana sebesar itu kita gunakan untuk keperluan wewalungan seperti menyumbangkan babi, itik, bebek dan lainnya...”

Masyarakat Desa Pekraman Kebon sangat terbantu oleh adanya dana sosial LPD yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui paruman adat, pengurus LPD Desa Pekraman Kebon mengelola dana sosialnya untuk program Pitra Yadnya yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:

“...Upacara pitra yadnya disini diadakan setiap lima tahun sekali. Sebelum ada program ngaben massal ini, masyarakat dapat dikatakan berat atau berpikir ulang untuk melaksanakan upacara ngaben secara mandiri dikarenakan memang dana untuk ngaben sangat besar disini. Namun, dengan adanya program ngaben massal yang dibiayai oleh LPD dengan menggunakan dana sosial ini sangat membantu masyarakat untuk melaksanakan upacara ngaben. Seluruh biayanya ditanggung oleh LPD, Masyarakat hanya perlu mengeluarkan 100kg beras per sawo nya...”

LPD Desa Pekraman Kebon juga menyiapkan beasiswa bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Beasiswa tersebut berupa buku dan alat tulis bagi siswa TK sampai dengan SMA. Bahkan, masyarakat yang merantau keluar desa tetap mendapatkan buku dan alat tulis tersebut selama warganya masih merupakan warga Desa Pekraman Kebon.

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:

“...Walaupun tinggal diluar desa, kami selalu membagikan secara merata apa yang seharusnya memang warga kami dapatkan. Saat Hari Raya Galungan juga kami rutin membagikan daging babi kepada seluruh warga kami menggunakan dana sosial itu, bahkan yang tinggal diluar desa pun tetap kami bagikan dengan menitipkan pada keluarga terdekat yang masih tinggal disini...”

Dalam hal menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan, LPD Desa Pekraman Kebon menyisihkan sebagian dana sosial untuk kepentingan lingkungan.

Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:

“...Kebersihan lingkungan disini kita percayakan kepada pecalang ya. Sebagian dana sosial yang sudah diperhitungkan itu kita serahkan kepada pecalang untuk dikelola kembali, baik untuk kebersihan maupun keamanan lingkungan desa...”

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga melaksanakan akuntabilitasnya yang berlandaskan atas budaya tri hita karana. Dalam LPD, istilah CSR memang tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Kedua LPD dalam penelitian ini mengelola dana sosialnya berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. Menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan berupa dana punia berupa hewan seperti babi, itik, bebek dan lainnya serta pembangunan Pura. Menjaga hubungan harmonis dengan manusia melalui beasiswa maupun ngaben massal. Menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan melalui pelestarian dan keamanan lingkungan. Hal yang berbeda dari kedua LPD dalam penelitian ini terkait dengan pengelolaan dana sosial terletak pada program-program yang dimiliki. Namun, untuk pembagiannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002 tentang LPD yang mewajibkan LPD untuk membagi labanya 5 % untuk dana sosial. Akuntabilitas LPD dalam penelitian ini juga telah dilaksanakan, dimana LPD telah memberikan tanggung jawab sosialnya kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan berupa beasiswa, kebersihan lingkungan, pengadaan ngaben massal serta dana punia untuk kepentingan Pura.

REFERENSI

- Cindy, A, Salle, D A, A.R. (2018) ‘Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money’, *Akuntansi dan Keuangan Daerah* [Preprint].
- Elkington, J. (1998) *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*.
- Handoko, B.L. (2021) *Stakeholder theory dan Hubungannya dengan Sustainability Report*, *Artikel*.
- Hasniati (2016) ‘Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa’, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* [Preprint].
- Kurniawan (2016) ‘Peran Adat dan Tradisi dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pekraman’, *Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari)* [Preprint].
- Pertiwi, I.D.A.E. dan U.L. (2013) ‘Implementasi Corporate Social Responsibility berlandaskan Budaya Tri Hita Karana’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4 No 3.
- Putra, C.G.B. and Muliati, N.K. (2020) ‘Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), pp. 561–580. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>.
- Putra Suryanata, I.G.N. (2019) ‘Sinergisitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(1), p. 206. Available at: <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i1.2028>.
- Sari dan Sudana, I.P. (2020) ‘Managerial Accountability of Badan Usaha Milik Desa Wija Sari in Samsam Village: A Case Study Research’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), p. 152.
- Somania, N.N.V. (2019) ‘Analisis Pengelolaan Dana Sosial Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility untuk Meningkatkan Reputasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Sumberkima dan Lembaga Perkreditan Desa Pejarakan)’, pp. 38–49.
- Suardhika, I.M.S. (2013) ‘Pengaruh Implementasi Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dimediasi Keyakinan Diri Atas Komputer, Keinovatifan Personal, Persepsi Kegunaan, dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali’, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(1), pp. 102–128.
- Suardikha, I.M.S. and Budiasih, & I.G.A.N. (2017) *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat. Available at: http://scholar.google.co.id/scholar?q=sistem+informasi+akuntansi&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#7.

Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Bisnis*.

Supadmi & Dharma (2018) 'Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2), pp. 132–145. Available at: <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>.

Suryawan, K.I. and Suaryana, I.G.N.A. (2018) 'Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD', *E-Jurnal Akuntansi*, 23, p. 871. Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p03>.

Windia, dan Dewi, R.K. (2007) *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*.